

TATA KELOLA DAN MANAJEMEN KEUANGAN KELOMPOK UMKM DI DESA WISATA

Yuli Ermawati^{*}, Pujianto^b
Universitas Wijaya Putra
*yuliermawati@uwp.ac.id

Abstract

. Rural economic restructuring needs to be done immediately by utilizing village resources optimally with the entrepreneurial movement. One of the entrepreneurial movements is through the development of Tourism Villages. From the development of tourist villages, it can create or increase the role of MSME groups in the surrounding area. Weak financial literacy and access to capital for MSMEs often hinder their performance progress. With good financial management in the MSME group, it will improve the progress of their business. The purpose of this study was to identify and assess the level of effectiveness of financial governance and management in MSME groups in tourist villages. The research method used is qualitative by conducting observations and interviews with key informants in the tourist village of Sekapuk, Gresik. The results showed that the governance and financial management of the Mbok Inggih MSME group was based on a joint venture capital system and profit sharing through PKK management. This system can be said to be effective because it meets the Empowerment index. The Empowerment index assesses the effectiveness of MSME empowerment from 7 indicators

Keywords; Financial management; MSME group; Tourist Village

Abstrak

Penataan ekonomi perdesaan perlu segera dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya desa secara optimal dengan gerakan kewirausahaan. Salah satu gerakan kewirausahaan adalah melalui pengembangan Desa Wisata. Dari pengembangan desa wisata dapat memunculkan maupun meningkatkan peran kelompok UMKM di wilayah sekitar. Lemahnya literasi keuangan dan akses permodalan UMKM seringkali menghambat kemajuan kinerja mereka. Dengan adanya pengelolaan manajemen keuangan yang baik pada kelompok UMKM akan meningkatkan kemajuan usaha mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menilai tingkat efektivitas tata kelola dan manajemen keuangan pada kelompok UMKM di desa wisata. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan melakukan observasi dan wawancara pada informan kunci di desa wisata Sekapuk, Gresik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola dan manajemen keuangan pada kelompok UMKM Dapur Mbok Inggih didasarkan pada sistem modal patungan dan bagi hasil melalui manajemen PKK. Sistem ini dapat dikatakan efektif karena memenuhi *Empowerment index*. *Empowerment index* menilai tingkat efektivitas pemberdayaan UMKM dari 7 indikator.

Kata kunci: Manajemen Keuangan; Kelompok UMKM ; Desa Wisata

1. Pendahuluan

Geliat perekonomian perdesaan seringkali dinilai lambat dibanding pembangunan ekonomi perkotaan. Penataan ekonomi perdesaan perlu segera dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya desa secara optimal dengan cara yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Untuk mencapainya, diperlukan dua pendekatan yaitu: (a)Kebutuhan masyarakat dalam melakukan upaya perubahan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan; dan (b)Political will dan kemampuan pemerintah desa bersama

masyarakat dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan yang sudah disusun (Rustiadi dalam Bachrein, 2010).

Salah satu solusi penting yang mampu mendorong gerak ekonomi desa adalah mengembangkan kewirausahaan bagi masyarakat desa melalui UMKM. Saat ini upaya pengembangan UMKM diterjemahkan dalam kebijakan pemerintah melalui 3 (tiga) program prioritas Kementerian Koperasi dan UMKM yaitu program pengembangan koperasi dan UKM, akses pembiayaan bagi koperasi dan UMKM, dan pemberdayaan UMKM melalui gerakan kewirausahaan nasional (Rahayu, 2017).

Data Kementerian Koperasi dan UKM RI tahun 2019 menyatakan bahwa jumlah UMKM sebanyak 65.465.497 Unit (99,99%), sedangkan Usaha Besar (UB) sebanyak 5.637 unit (0,01%). UMKM menyerap tenaga kerja 119.562.843 jiwa (96,92%), sementara Usaha Besar (UB) menyerap tenaga kerja 3.805.829 jiwa. Jumlah UMKM yang besar mengharuskan pemerintah memberikan perhatian yang besar terhadap kondisi UMKM, karena menyerap menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional, sementara Usaha Besar hanya menyerap sekitar 3%

Kinerja UMKM akan meningkat dengan memperhatikan faktor internal maupun eksternal. Faktor internal terdiri kompetensi sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, proses produksi dan pemasaran, sedangkan faktor eksternal meliputi kebijakan pemerintah, sosial budaya, kondisi perekonomian dan peran dari pihak terkait. (Rokhayati & Lestari, 2016, Munizu, 2010 dan Kinyanjui et al., 2017)

Secara lebih spesifik, permasalahan dasar yang dihadapi UMKM adalah: Pertama, kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar. Kedua kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh sumber sumber permodalan yang memadai. Ketiga, kelemahan di bidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia. Keempat, keterbatasan jaringan usaha kerjasama antar pengusaha kecil (sistem informasi pemasaran). Kelima, iklim usaha yang kurang kondusif, karena persaingan yang saling mematikan. Keenam, pembinaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil. (Kuncoro, 2009 dalam Ahmad, 2018)

Berdasarkan temuan Pricewaterhouse Cooper (PwC) pada bulan Juni 2019, sebanyak 74% UMKM di Indonesia belum mendapatkan akses pembiayaan, hal ini diakibatkan rendahnya tingkat literasi maupun inklusif keuangan dikalangan UMKM, yang jumlahnya mencapai 58,9 juta pada tahun 2018 (Kontan, 2019)

Hal tersebut terjadi dikarenakan untuk mendapatkan akses perbankan dan lembaga keuangan, UMKM dituntut untuk dapat menyajikan kinerja keuangan yang baik atas usaha mereka, sebagai salah satu syarat untuk dapat dinilai, dan memungkinkan dapat mengakses permodalan dari perbankan dan lembaga keuangan. Kurangnya literasi keuangan dan akses permodalan tersebut, membuat banyak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kesulitan untuk mengakses lembaga perbankan guna

mengembangkan usahanya, sehingga sulit bagi mereka untuk naik kelas menjadi pengusaha professional (Suara, 2019)

Berbagai program pemberdayaan UMKM telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendorong UMKM naik kelas guna mentransformasi struktur ekonomi Indonesia dari semula berbasis konsumsi masyarakat menjadi sektor produktif melalui investasi dan impor. Namun seringkali pemberdayaan tersebut belum bisa merata dikarenakan faktor SDM dari UMKM yang tidak sama. UMKM dengan SDM berpendidikan rendah kurang dapat menyerap program pemberdayaan tersebut. Sehingga diperlukan sistem tata kelola dan manajemen keuangan yang lebih merakyat dan membumi.

Untuk mempermudah penelitian, peneliti membatasi ruang lingkup permasalahan agar tidak terjebak dengan pelebaran tema dan masalah pemberdayaan yang terdapat di lapangan. Maka fokus penelitian ini adalah Tata Kelola dan Manajemen Keuangan kelompok UMKM di Desa Wisata.

2. Kajian Literatur

Desa Wisata

Desa wisata merupakan pengembangan suatu wilayah desa yang pada dasarnya tidak merubah apa yang sudah ada akan tetapi lebih cenderung kepada pengembangan potensi desa yang ada dengan melakukan pemanfaatan kemampuan unsur- unsur yang ada di dalam desa yang berfungsi sebagai atribut produk wisata dalam skala yang kecil menjadi rangkaian aktivitas atau kegiatan pariwisata dan mampu menyediakan serta memenuhi serangkaian kebutuhan perjalanan wisata baik dari aspek daya tarik maupun sebagai fasilitas pendukung (Muljadi, 2012)

Pengembangan pariwisata pedesaan didorong oleh tiga faktor. Pertama, wilayah pedesaan memiliki potensi alam dan budaya yang relatif lebih otentik daripada wilayah perkotaan, masyarakat pedesaan masih menjalankan tradisi dan ritual-ritual budaya dan topografi yang cukup serasi. Kedua, wilayah pedesaan memiliki lingkungan fisik yang relatif masih asli atau belum banyak tercemar oleh ragam jenis polusi dibandingkan dengan kawasan perkotaan. Ketiga, dalam tingkat tertentu daerah pedesaan menghadapi perkembangan ekonomi yang relatif lambat, sehingga pemanfaatan potensi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat lokal secara optimal merupakan alasan rasional dalam pengembangan pariwisata pedesaan

Pengembangan desa wisata akan

membawa banyak manfaat ke sektor lain, terutama sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dan menyerap tenaga kerja. Dengan begitu akan muncul bibit-bibit UMKM yang mampu bersinergi dengan desa wisata dan siap menghadapi kemajuan era digital.

UMKM

UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan, yakni sebagai berikut.

- a. Usaha Mikro : Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro dengan aset maksimal 50 juta rupiah dan omzet maksimal 300 juta rupiah.
- b. Usaha Kecil : Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Kriteria usaha kecil ini memiliki aset lebih dari 50 juta rupiah dengan omzet lebih dari 300 juta sampai 2,5 milyar rupiah.
- c. Usaha Menengah: Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar. Kriteria usaha menengah ini memiliki aset lebih dari 500 juta rupiah sampai 10 milyar rupiah dan omzet lebih dari 2,5 milyar sampai 50 milyar rupiah

Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan merupakan hal yang sering diabaikan UMKM. Pengelolaan keuangan baru dapat dilakukan jika semua aktivitas keuangan dicatat dan diakui kedalam laporan keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku.

Manajemen keuangan merupakan semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha- usaha mendapatkan dana

perusahaan dengan biaya yang murah serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien (Sutrisno, 2003). Fungsi Pengelolaan manajemen keuangan dapat disimpulkan sebagai suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pengelolaan, pengendalian, pencarian, penyimpanan dan pemeriksaan dana yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perusahaan

Tujuan dilakukannya pengelolaan keuangan (manajemen keuangan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas keuangan. Pengelolaan keuangan yang efisien berarti dapat dilihat dari kemampuan untuk memaksimalkan input dan output, dalam keuangan berarti pemasukan dan pengeluaran uang. Pengelolaan keuangan yang efektif berarti sampai sejauh mana perusahaan mampu mencapai tujuan yang menjadi target perusahaan. Pelaksanakan semua program dengan tepat dan penggunaan keuangan yang tepat akan tercapai pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien

Model Pengelolaan Keuangan yang baik menjadi hal yang penting dalam kelangsungan usaha. UMKM melakukan proses pencatatan mulai pengumpulan bukti, pencatatan, pengolongan yang terakhir proses pelaporan. UMKM dapat menyusun laporan keuangan secara sederhana. Proses pencatatan dapat dilakukan secara manual, memanfaatkan teknologi informasi dan kombinasi antara manual dengan teknologi. Model pengelolaan keuangan UMKM dilakukan dengan memanfaatkan teknologi sehingga mempermudah penyusunan laporan keuangan. Hasilnya informasi keuangan menjadi berkualitas sehingga meningkatkan kinerjanya. (Diah Wahyuningsih, 2019)

Kinerja UMKM

Kinerja UMKM adalah harapan untuk mencapai prestasi dengan ukuran finansial dan non finansial. Pencapaian kinerja UMKM secara finansial ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah penjualan, modal usaha bertambah, tren laba meningkat. Sedangkan pencapaian kinerja non-financial diukur dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja dan perluasan daerah pemasaran. (Rokhayati, 2015)

Pengelola suatu usaha perlu juga memperhatikan fungsi manajemen keuangan untuk meningkatkan kualitasnya. Fungsi manajemen keuangan terdiri dari tiga keputusan yang saling terkait yaitu investment, funding, dan working capital decision (Ross, Westerfield, & Jordan, 2000)

Penelitian (Suindari & Juniariani, 2020) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan yang baik akan menghasilkan kinerja UMKM semakin meningkat. Kemudian penelitian (Wahyudiati & Isroah, 2018) menyatakan bahwa aspek keuangan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Hasilnya informasi keuangan menjadi berkualitas sehingga meningkatkan kinerjanya. Diah Wahyuningsih, 2019 dalam penelitiannya menyatakan bahwa informasi keuangan yang berkualitas akan meningkatkan kinerja UMKM

Indikator Keberhasilan Pemberdayaan UMKM

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Schuler, Hashemi dan Riley yang dikutip oleh Edi Suharto (2009) mengembangkan delapan indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai empowerment index atau indeks pemberdayaan. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka dalam kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan politis

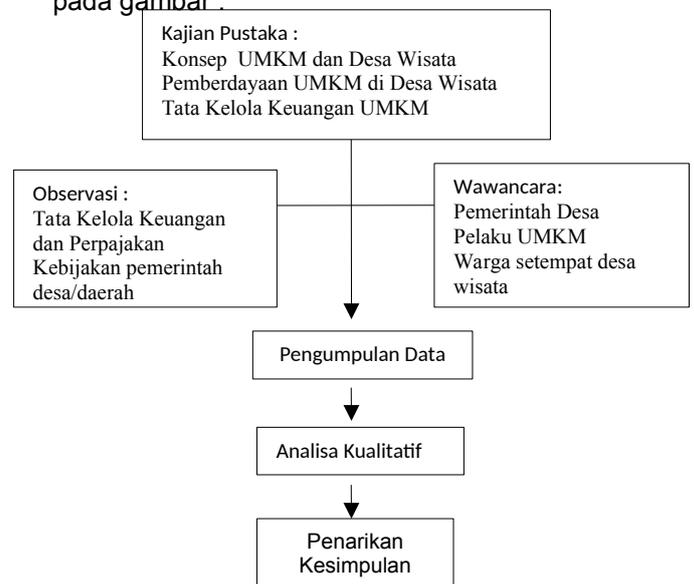
- Kebebasan mobilitas, kemampuan individu untuk pergi keluar rumah atau wilayah tempat tinggalnya. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendiri.
- Kemampuan membeli komoditas kecil, kemampuan individu untuk membeli barang-barang pokok kebutuhan sehari-hari (beras, minyak, bumbu), kebutuhan dirinya (sabun, sampo, peralatan makeup).
- Kemampuan membeli komoditas besar, kemampuan individu untuk membeli barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, televisi, radio, koran, majalah dan lain sebagainya
- Terlibat dalam keputusan keputusan rumah tangga, misalnya keputusan merenovasi rumah, membeli kambing untuk ditenak. Membuat keputusan keputusan sendiri maupun secara musyawarah dilakukan secara kebersamaan dan kesetaraan dalam keluarga.
- Kebebasan relatif dari dominasi keluarga, tidak adanya diskriminasi dalam keluarga yang menimbulkan ketidakadilan dan pelanggaran maupun kekerasan.
- Kesadaran hukum dan politik, keterlibatan individu dalam pengambilan

peran dalam proses budaya, hukum dan politik. Misalnya mengetahui peran pemerintah desa atau kelurahan

- Keterlibatan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan publik, tindakan bersama untuk membela orang lain menghadapi perlakuan salah dalam keluarga dan masyarakat

3. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu penelitian untuk memperoleh data deskriptif berupa data-data tertulis ataupun lisan dengan melakukan teknik pendekatan kepada pelaku yang diamati (Lexxy Moleong, 1990) Secara garis besar alur/proses penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar :



Gambar 1. Skema Alur Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Wisata Sekapuk, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Penelitian ini memerlukan informan yang mempunyai pemahaman dan pengalaman langsung yang berhubungan dengan pemberdayaan umkm di desa wisata. Adapun informan yang dipilih adalah pihak Pemerintah Desa, Pelaku UMKM di Desa Wisata, dan Warga setempat sekitar Desa Wisata

Teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah interaktif melalui proses reduction, data display, dan verification (Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2019).

Setelah menampilkan hasil analisa data yang mengarah pada kesimpulan yang bersifat terbuka, peneliti melakukan triangulasi (sumber, teknik, dan waktu

pengumpulan data), diskusi dengan teman sejawat, menerima masukan dari pembaca, memaknai analisis spesifik sehingga menghasilkan kesimpulan yang jelas.

Menurut Sugiyono Uji Keabsahan Data dalam penelitian kualitatif meliputi uji validitas internal / credibility, validitas eksternal / transferability, reliabilitas / dependability, dan obyektivitas / confirmability. (Sugiyono, 2019)

4. Hasil dan Pembahasan

Sekapuk adalah sebuah desa di Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik provinsi Jawa Timur. Jumlah Penduduk Desa Sekapuk sebanyak 4.673 orang, jumlah Laki – laki sebanyak 2.324 orang, Perempuan sebanyak 2.349 orang dengan tingkat kepadatan Penduduk 15,7 c/Luas Desa. Desa ini menjadi desa wisata sejak dibukanya destinasi wisata SETIGI pada tahun 2018. Pada tahun 2003, Desa Sekapuk menurut IDM BPS merupakan desa tertinggal. Tahun 2017 menjadi Desa berkembang dan di tahun 2021 menjadi Desa Mandiri.

Satu hal yang menarik dari proses pembangunan desa ini adalah, setiap kegiatan atau program yang dijalankan dilakukan sepenuhnya secara mandiri. Desa Sekapuk tidak menggunakan bantuan pemerintah daerah, maupun bantuan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari sebuah perusahaan. Semua dana yang didapatkan adalah hasil dari patungan warga Desa Sekapuk, dan pemerintah desa yang kemudian dikumpulkan ke BUMDes.

“Semua kegiatan yang kami jalankan dilakukan sepenuhnya secara mandiri. Kami tidak menggunakan bantuan pemerintah daerah, maupun bantuan dana CSR dari perusahaan. Semua dana yang didapatkan adalah hasil dari patungan warga Desa Sekapuk, bahkan setiap warga desa diangkat langsung menjadi investor untuk mengembangkan Desa Sekapuk. Mengapa? Karena saya tidak ingin warga jadi pembantu, jadi buruh, ataupun jadi KACUNG didesa sendiri.”, tutur Kepala Desa Sekapuk

Strategi pengembangan desa wisata melalui pemberdayaan UMKM berarti melibatkan masyarakat setempat dalam upaya meningkatkan kemampuan UMKM yang sinergi dengan pengembangan desa wisata. Tujuan pengembangan tersebut adalah untuk meningkatkan daya tarik pengunjung dan menggerakkan perekonomian masyarakat menuju yang lebih baik dan sejahtera.

Sekapuk memiliki kelompok usaha bernama “Dapur Mbok Inggih” yang merupakan kumpulan usaha dari 150 UMKM yang ada di Sekapuk. Kelompok usaha ini tidak tergabung kedalam Bumdes Sekapuk, namun dibawah pengawasan PKK Desa Sekapuk. Melalui PKK, kelompok usaha ini disinergikan dengan Pemerintah Desa. Adapun kelompok UMKM Dapur Mbok Inggih terdiri dari 3 kelompok yaitu stand kuliner, souvenir, dan jajanan

Ketua PKK Desa Sekapuk Ibu Rif'atul Mubarakah menyampaikan, *“Dapur Mbok Inggih itu gabungan dari UMKM di desa sekapuk yang jumlahnya 150 UMKM. UMKM ini adalah perwakilan UMKM dari 29 RT di desa Sekapuk. Ada yang di stand kuliner, ada yang souvenir, dan ada yang memproduksi jajanan khas Sekapuk yang jadi oleh-oleh wisata. Nah masing-masing RT punya ranah sendiri. Kalau rt yang satu memproduksi suatu barang, maka rt yang lain tidak boleh memasarkan barang yang sama. Biar adil dan tidak ada rasa cemburu sosial*

Lemahnya literasi, kemampuan manajemen dan terbatasnya akses pembiayaan UMKM secara individu menjadi kendala yang dihadapi sebagian besar UMKM di desa Sekapuk. Kelompok UMKM dapat menjadi solusi alternatif untuk mengatasi kendala tersebut dan mempermudah dalam pengawalan atau pemberdayaan dari pemerintah desa. Jika manajemen pengelolaan jadi satu, maka tingkat kesejahteraan dan peluang pendapatan akan lebih besar dan merata. Manajemen usaha dari UMKM yang kurang baik akan dapat dicover oleh UMKM yang lebih baik. Begitu juga nantinya dengan sistem pengelolaan keuangan, perizinan, dan pemasaran. Akan lebih mudah dalam mengarahkan karena semua menjadi satu payung.

Adapun pemetaan Kelompok UMKM Dapur Mbok Inggih yaitu; (1) 30 stand kuliner di masing-masing tempat wisata dimana setiap stand adalah stand dari masing-masing RT di Desa Sekapuk yang menaungi produk kuliner di setiap RT, (2) Pengelolaan souvenir di Desa Sekapuk yang menjadi suplier usaha souvenir di masing-masing kelompok pembuatan souvenir di Desa Sekapuk, (3) Dapur jajanan Mbok Inggih yang menjadi suplier jajanan makanan khas dan oleh-oleh wisata Desa Sekapuk dari seluruh produsen warga Sekapuk.

Pengelolaan manajemen usaha dan keuangan Dapur Mbok Inggih juga disinergikan dengan PKK Desa Sekapuk.

Untuk manajemen usaha, UMKM yang tergabung dalam Dapur Mbok Inggih diberikan keleluasaan untuk berinovasi dalam hal produk, namun untuk label dan merk menjadi satu yaitu "Dapur Mbok Inggih". Prosedur dan standar produksi telah ditentukan oleh pengurus Dapur Mbok Inggih sesuai dengan kesepakatan dan standar berlaku umum. Untuk pengelolaan keuangan, pos keuangan Dapur Mbok Inggih tidak jadi satu dengan keuangan PKK walaupun pengurusnya sama yaitu dari PKK.

Dapur Mbok Inggih dalam usaha meningkatkan kuantitas dan kualitas produknya melakukan beberapa pelatihan. Ada pelatihan kuliner dengan mendatangkan Chef dari Restoran/Hotel terkemuka, sosialisasi standar kesehatan makanan dari Puskesmas, bahkan sampai pada pelatihan dalam pengemasan. Ini semua disinergikan dengan pemerintah desa, sehingga untuk pembiayaan berasal dari Pendapatan Desa.

Permodalan Dapur Mbok Inggih awalnya berasal dari sistem modal patungan anggota dimana pelaku UMKM menggunakan dana kas PKK untuk membeli produk hasil UMKM. Kemudian produk tersebut dipasarkan dan hasil penjualan akan kembali ke kas PKK. Setelah berkembang dan Dapur Mbok Inggih mampu membeli kemasan dan label untuk dapat dipergunakan secara bersama. Kini bahan baku produksi berasal dari produsen masing-masing UMKM, namun untuk pengemasan akan difasilitasi oleh pengurus Dapur Mbok Inggih. Setiap minggunya, administrasi keuangan akan disajikan secara terbuka dan pencairan hasil penjualan dapat diberikan dengan sistem bagi hasil.

Selain itu dengan adanya destinasi wisata di desa akan semakin memperluas pasar Dapur Mbok Inggih. Produk dari kelompok UMKM ini dapat dijadikan sebagai oleh-oleh wisata. Tidak perlu banyak membuka stand atau menggaji pegawai untuk menjaga toko. Anggota kelompok UMKM tersebut dapat menitipkan produknya langsung kepada pengurus Dapur Mbok Inggih untuk dipasarkan menjadi satu. Seperti yang disampaikan Ketua PKK, "*Ini yang namanya multiefek, dimana pembangunan wisata desa memberikan dampak bagi warga terutama dari segi ekonomi, selain menambah penghasilan, usaha Dapur Mbok Inggih juga bisa melestarikan warisan leluhur/nenek moyang*".

Pengelolaan Dapur Mbok Inggih juga disertai dengan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan setiap bulan baik dari pusat PKK desa maupun di tingkat PKK RT. Dalam 1 minggu tercatat omset Dapur Mbok Inggih

mencapai Rp.150.000.000 sebagaimana disampaikan ketua PKK Desa Sekapuk, "*Walaupun dengan harga ekonomis yaitu mulai Rp.5000 perbungkus jajanan Dapur Mbok Inggih berkembang pesat. Jajanan dari warga dikumpulkan di Dapur Mbok Inggih dengan 1 label yaitu Dapur Mbok Inggih. Dihitung dan dikumpulkan dari warga setiap minggunya. Bahkan kami dapat mencairkan uang warga dari produk jajanan sampai Rp.150.000.000 lho. Alhamdulillah rezeki ibu2 produsen Dapur Mbok Inggih*".

Sekretaris PKK menyampaikan, "*Bulan Nopember 2021, Dapur Mbok Inggih bersinergi dengan pemerintah desa melakukan Sosialisasi dan pendampingan dalam pengurusan perizinan UMKM yaitu NIB dan PIRT. Karena UMKM ini dalam bentuk kelompok, maka lebih mudah dalam pengawalannya.*"

Kendala yang dihadapi oleh Dapur Mbok Inggih adalah kurangnya pengetahuan dan penerapan IPTEK bagi peningkatan kuantitas dan kualitas produk Dapur Mbok Inggih. Hal ini dapat menjadi faktor penghambat kemajuan dan pelebaran sayap Dapur Mbok Inggih untuk merambah ke pasar nasional bahkan internasional.

Sinergi antara pemerintah desa dan kelompok usaha menjadi kunci utama keberhasilan pengelolaan dan manajemen keuangan kelompok UMKM di Desa Wisata. Salah satu Indikator kemajuan bangsa ditentukan dari pertumbuhan ekonominya, dan UMKM merupakan salah satu faktor penunjang dalam pertumbuhan ekonomi tersebut.

Berdasarkan indikator pemberdayaan atau empowerment index atau indeks pemberdayaan menurut Schuler, Hashemi dan Riley yang dikutip oleh Edi Suharto (2009), strategi pemberdayaan UMKM di Desa Sekapuk memenuhi beberapa indikator yaitu,

1. Kebebasan mobilitas. UMKM di bawah naungan Dapur Mbok Inggih telah memiliki 2 mobil operasional dari penyisihan laba usaha.
2. Kemampuan membeli komoditas kecil. Seluruh UMKM di bawah naungan Dapur Mbok Inggih telah diberikan alat untuk pengemasan secara mandiri, dan memiliki 1 label bersama bernama Dapur Mbok Inggih.
3. Kemampuan membeli komoditas besar. UMKM di bawah naungan Dapur Mbok Inggih telah memiliki dapur umum untuk menerima produk dari seluruh UMKM dan mobil.

4. Terlibat dalam keputusan bersama. UMKM di bawah naungan Dapur Mbok Inggih sudah memiliki agenda Monev
5. Kebebasan berkeadilan. UMKM di bawah naungan Dapur Mbok Inggih memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dengan diberikannya kesempatan untuk semua RT.
6. Kesadaran hukum dan politik. Dapur Mbok Inggih memiliki perizinan usaha
7. Keterlibatan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan public. karena Dapur Mbok Inggih menaungi seluruh UMKM di Desa Sekapuk, maka secara otomatis ikut meningkatkan kesejahteraan publik

5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Lemahnya literasi, kemampuan manajemen dan terbatasnya akses pembiayaan UMKM secara individu menjadi kendala yang dihadapi sebagian besar UMKM di desa Sekapuk. Solusi kendala tersebut adalah dengan dibentuknya kelompok UMKM Dapur Mbok Inggih.
2. Sinergi antara pemerintah desa dan kelompok usaha menjadi kunci utama keberhasilan pengelolaan dan manajemen keuangan kelompok UMKM di Desa Wisata.
3. Tata kelola dan manajemen keuangan pada kelompok UMKM Dapur Mbok Inggih didasarkan pada sistem modal patungan dan bagi hasil melalui manajemen PKK dengan administrasi keuangan yang terbuka.
4. Sistem yang diterapkan Dapur Mbok Inggih dapat dikatakan efektif karena memenuhi *Empowerment index*.

Saran

Adapun saran yang diberikan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Untuk pengurus Dapur Mbok Inggih agar tetap konsisten dengan sistem yang dijalankan dan selalu melakukan monev untuk kemajuan bersama
2. Untuk pemerintah desa agar menarik instansi-instansi yang dapat digandeng untuk meningkatkan penerapan IPTEK pada kelompok UMKM Dapur Mbok Inggih
3. Untuk warga Sekapuk agar memanfaatkan peluang yang ada

secara optimal dan menumbuhkan bibit-bibit UMKM yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga

4. Untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan melakukan evaluasi pengelolaan (perhitungan) keuangan secara riil

Daftar Pustaka

- Agusetyaningrum, et al. (2016). Strategi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk Meningkatkan Citra Kota Malang sebagai Destinasi Wisata Kuliner. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* 38(2), 105-111
- Ahmad, Faizal dan E. Rahayu. (2018). Model Kemitraan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Pedesaan. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 19(2), 145-158
- A. J., Muljadi, (2012). *Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Diah Wahyuningsih, A. F. (2019). Rencana Model Tata Kelola Keuangan UMKM. *Jurnal IKRA-ITH Humaniora*, 3(3), 83-92
- Edi Suharto. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika aditama
- Kuncoro, M. (2009). *Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan Edisi 5*, Yogyakarta: STIM YKPN.
- Kuncoro, M. (2014). *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi. Edisi 4*. Jakarta: Erlangga
- Mubyarto. (1997). *Ekonomi Rakyat Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media
- Munizu, M. (2010). Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal dan Internal Terhadap Kinerja Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Sulawesi Selatan. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 12(1), 33-41. <https://doi.org/10.9744/jmk.12.1.pp.33-41>
- Richardson, John dan Martin Fluker. (2004). *Understanding and Managing Tourism*. Australia: Pearson Education.
- Rokhayati, I., & Lestari, H. D. (2016). Faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja UMKM gula kelapa (Studi kasus UMKM gula kelapa di Kabupaten Banyumas). *Jurnal Ekonomi*, 544-556. <https://core.ac.uk/download/pdf/267947573.pdf>
- Ross, S. Westerfield, R. & Jordan, B. 2000. *Modern Financial Corporate*. Mc Graw Hill.
- Sartono, Agus. 2001. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. BPFE. Yogyakarta
- Suindari, N. M., & Juniariani, N. M. R. (2020). *Pengelolaan Keuangan, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Strategi*

- Pemasaran Dalam Mengukur Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm). KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi, 11(2), 148–154. <https://doi.org/10.22225/kr.11.2.1423.148-154>
- Supriyanto, B. (2018). Pemberdayaan Ukm: Pusat Layanan Usaha Terpadu Mulai Dirintis. Retrieved June 10, 2018, from <http://industri.bisnis.com/read/20130426/87/11043/pemberdayaan-ukm-pusat-layananusaha-terpadu-mulai-dirinti>
- Tambunan, Tulus. (2008). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*
- Undang-Undang Nomor 90 Tahun 1990 tentang Kepariwisata
- Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM (Jakarta: LP3ES, 2012), hal. 11
- Wahyudiati, D., & Isroah. (2018). Pengaruh Aspek Keuangan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (Sdm) Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Desa Kasongan. *Jurnal Profita*, 2, 1–11
- Zakaria, et al. (2014). Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata di Desa Bandung Kecamatan Pakong. Kabupaten Pamekasan". *Jurnal Teknik POMTS* 3(2)